

## DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA DI KABUPATEN DEMAK)

Valentina Adventa Khesa Widhastama<sup>1</sup>, Jaeni<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang<sup>1,2</sup>

E-mail: valentina.adventa@gmai.com<sup>1</sup>, jaeni@edu.unisbank.ac.id<sup>2</sup>

### *Abstract*

*The result of the research has the aim of impacting the determinants of accountability in village's financial management in Demak Regency. Research testing uses causal testing (hypothesis testing) because it uses hypotheses for tests carried out between variables. The sample on the researches was taken just use purposive sampling of 80 respondents. The data on this research using method uses quantitative data and primary data. That type use research on data uses validity test methods, reliability of tests, multiple linear regression for analysis, classic assumption tests (normality, multicollinearity and heteroscedasticity) and hypothesis tests processed using SPSS 26. The results of task are presentation of financial statements is not significant and negative. That research Internal Control System the results are significant and positive. The results of Community Participation are not significant and positive. The Village Apparatus Competency results are significant and positive in. Meanwhile results of Financial Report Accessibility are insignificant and negative.*

**Keywords :** Financial Statement Accessibility, Internal of Control System, , Village Financial Management Accountability

### 1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 yang 12 mengatur tentang Desa, pemerintah memberi kesempatan kepada desa sebagai pengelolaan secara mandiri Dana Desa yang digunakan untuk 45 mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan 110 120 kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini bisa dikatakan pemerintah memberikan kesempatan lebih untuk desa di Indonesia untuk mengelola ADD (Sweetenia et al., 2019).

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan sebagai entitas yang baik dalam aspek bisnis maupun pemerintahan. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 135 keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola kepemerintahan 143 yang baik. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok 136 atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya 91 (Puspa & Prasetyo, 2020).

Menurut penelitian (Puspa & Prasetyo, 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian pada akuntabilitas internal memiliki dana desa. pengaruh pengelolaan semakin baik pengendalian internal yang maka akan semakin akuntabel. Partisipasi masyarakat adalah hak yang dimiliki masyarakat dalam ikut andil pengambilan keputusan pada tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Masyarakat tak hanya sebagai penerima fasilitas dan manfaat 5 tetapi sebagai subjek pembangunan (Fajri & Julita, 2021).

Aksesibilitas pengelolaan keuangan desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan. Akses publik yang mudah identik dengan internet dapat melalui sebuah blog atau website yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun kenyataannya tidak semua desa punya website sendiri dan saat ini ada desa yang mengunggah laporannya ke websitenya jadi mereka hanya melaporkannya kepada bupati atau walikota melalui camat, kepada BPD, dan kepada warganya melalui sebuah musyawarah desa (Khoirina, 2023). Menurut penelitian (Temalagi & Anakotta, 2021) menyatakan aksesibilitas laporan keuangan dapat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut penelitian (Khoirina, 2023) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 53 keuangan desa.

## 2. KAJIAN TEORI

### **Teori *Stewardship***

Dasar teori yang menjadi fokus penelitian ini adalah teori pengelolaan 102 (stewardship theory) seperti yang dijelaskan oleh Jefri (2018). Teori ini menggambarkan situasi di mana manajemen tidak terutama didorong oleh kepentingan pribadi, tetapi lebih kepada pencapaian tujuan organisasi. Teori ini mengandaikan bahwa ada hubungan yang kuat antara keberhasilan dan kepuasan organisasi. Keberhasilan organisasi mengartikan pemanfaatan optimal dari manfaat bagi pemangku kepentingan (principals) dan manajemen. Pada akhirnya, pemanfaatan optimal ini bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan individu yang terlibat dalam organisasi tersebut 112 Implikasi teori pengelolaan (stewardship) terhadap riset ini adalah bahwa Pemerintah Desa, sebagai agen yang bertanggung jawab atas 140 pengelolaan dana publik, diharapkan berperan sebagai entitas yang dapat dipercaya dan berkomitmen untuk memajukan kepentingan masyarakat (principals). Dalam konteks ini, Pemerintah Desa dianggap sebagai steward yang bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan padanya untuk 114 meningkatkan kesejahteraan warga desa. (Khoirina, 2023).

### **Akuntabilitas**

Menurut penelitian oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan laporan atau penjelasan tentang kinerja dan kegiatan seseorang dalam sebuah unit organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini sangat penting karena memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan kepastian. Ada dua bentuk akuntabilitas, yaitu konkret dan harus diatur oleh hukum melalui prosedur yang spesifik terkait dengan masalah yang dihadapi dan dipertanggungjawabkan (Repitamala et al., 2023).

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Manajemen keuangan desa adalah rangkaian aktivitas yang dimulai dari perencanaan, implementasi, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban terhadap keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penerimaan dan alokasi pendapatan desa ke rekening kas desa, serta penggunaannya, diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Proses pencairan dana untuk rekening kas desa memerlukan tanda tangan dari Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pengelolaan keuangan desa meliputi berbagai tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### **Penyajian Laporan Keuangan**

Menurut (Halim dan Abdullah 2008) mengatakan penyajian laporan keuangan menjadi bentuk dari akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Penyajian laporan keuangan juga merupakan hal terencana mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi. Laporan keuangan pada entitas sektor publik merupakan komponen penting untuk mencapai akuntabilitas yang baik pada sektor publik. (KASP, 2015) menyatakan yaitu dalam proses pembuatan laporan keuangan menjadi tahap akhir dari siklus akuntansi. Data yang diperoleh laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur yang sekarang digunakan dasar penyusunan laporan keuangan.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Matamande, et al. (2012), sistem pengendalian internal adalah menempatkan kebijakan dalam organisasi yang disetujui proses pengendalian intern dibuat oleh manajemen suatu organisasi untuk tercapainya tujuan utama manajemen dan memastikan bisnis beroperasi sempurna. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan sistem yang digunakan dalam kelancaran perencanaan dilakukan terus menerus dari pemimpin sampai ke karyawan tanpa kecuali guna memberi keyakinan atas pencapaian entitas, PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP yang mengatur tentang Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintahan. Inspektorat daerah adalah pengawas internal dan keberadaan inspektorat ini sangatlah penting karena tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

### **Partisipasi Masyarakat**

Menurut Dewi et al. (2013), partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari bentuk pengelolaan dana desa yang berjalan baik (Medianti 2018).

### **Kompetensi Perangkat Desa**

Sedarmayanti (2014) mengemukakan kompetensi suatu SDM adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksi kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi SDM adalah apa yang outstanding performers lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang baik daripada apa yang dilakukan penilai kebijakan. Faktor yang harus diperhatikan adalah perilaku. Abdussamad (2014) membagi kompetensi SDM dalam dua tingkatan yakni ada yang tampak dan yang tidak tampak, spencer dan spencer mengilustrasikan seperti gunung es di mana ada

yang tampak di permukaan, adapula yang tidak terlihat di permukaan. Kompetensi SDM yang tampak di pemukaan adalah Pengetahuan (*knowledge*) dan Keterampilan (*skill*), kompetensi SDM yang tidak tampak di permukaan adalah Nilai-nilai (*values*), konsep diri (*self image*), karakteristik personal (*traits*), dan motif (*motives*).

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Bentuk pertanggungjawaban publik yang transparan dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang didukung oleh aksesibilitas. Laporan keuangan tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti yang diungkapkan oleh Mustofa (2012). Efektivitas akuntabilitas tergantung pada kemudahan akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dimengerti. Akses ini dapat diberikan melalui berbagai media, termasuk surat kabar, majalah, radio, televisi, situs web, dan forum yang memperhatikan atau mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, seperti yang disebutkan oleh Shende & Bennet (2004). Mulyana (2006) menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mengacu pada kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi dari laporan keuangan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113, laporan keuangan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus 55 disampaikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang memudahkan akses bagi masyarakat.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

*International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) menyatakan pada pelaporan keuangan sektor publik ditujukan untuk melayani tujuan evaluasi akuntabilitas dan pengambilan keputusan pengguna. Akuntabilitas merupakan tujuan dan dasar pelaporan keuangan. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan mendapatkan infomasi atas segala kegiatan yang menggunakan dana desa. Penyajian laporan keuangan dana desa saat ini dapat ditemui di kantor desa ataupun website resmi desa yang diperbarui secara berkala. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sya'diah et al., 2022) mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pada penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Karya Kecamatan Rantau Rasau. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang tepat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama penelitian ini adalah:

**H1 : Penyajian Laporan Keuangan dapat berpengaruh secara positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa**

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Sistem pengendalian internal memainkan peranan vital dalam sebuah organisasi. Pengendalian internal merupakan elemen untuk mewujudkan akuntabilitas. Hal tersebut tidak dapat terpisahkan dari struktur tata kelola organisasi yang ditujukan untuk mengarahkan dan mengendalikan akvititas dengan mendorong transparansi, tanggungjawab, dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Kegagalan dalam menciptakan sistem pada penelitian yang dilakukan (Puspa & Prasetyo, 2020) menyatakan sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi semakin baik sistem pengendalian internal yang

diimplementasikan dalam penyelenggaraan organisasi maka akan semakin akuntabel pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian diatas makan dirumuskan hipotesis kedua penelitian ini adalah:

**H2 : Sistem pengendalian internal dapat berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa**

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat berproses pada pengelolaan keuangan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi yang dilaksanakan serta mengambil bagian dalam bentuk kegiatan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan (Irmawati, 2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas makan dirumuskan hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

**H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa**

### **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Kompetensi merupakan suatu personalitas yang dipunyai seseorang yang meliputi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan ketika merealisasikan sesuatu. Kompetensi atau kapasitas pengelola dana desa menjadi tuntutan penting agar akuntabilitas desa dapat direalisasikan optimal. Kompetensi menjadi nilai penting atau syarat utama pada PDD yang baik dan akuntabel sebabnya aparat desa yang handal dan cakap ketika pengelolaan pada dana desa akan mudah dalam menjalankan tugas. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zulkifl et al., 2021) menunjukan pada variabel kompetensi aparatur desa dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

**H4 : Kompetensi perangkat desa pada memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Perlunya penyusunan akuntansi keuangan yang bermutu dan kemudahan ketersediaan informasi kepada publik memastikan kualitas sikap terbuka dan akuntabilitas keuangan desa. Penguasa memiliki kewajiban untuk menyediakan suatu informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan. untuk mengambil keputusan dan untuk mempromosikan akuntabilitas pemerintah kepada publik. Penelitian terdahulu yang dilakukan (Temalagi & Anakotta, 2021) menyatakan yakni pada aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas makan dirumuskan hipotesis keempat penelitian ini adalah:

**H5 : Aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diteliti menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan cara melakukan survei dengan teknik penyebaran kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada aparat desa yang meliputi, kepala, sekretaris, dan kepala urusan keuangan. Metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena peneliti dapat menentukan kriteria penilaian yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi tujuan penelitian.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Penelitian

Penyebaran kuisioner disebar peneliti ke pegawai Kantor Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pengukuran kuisioner dengan skala likert yang digunakan sebagai bentuk pengukuran variabel penelitian meliputi variabel dependen maupun independen yaitu penyajian laporan keuangan (X1), sistem pengendalian internal (X2), partisipasi masyarakat (X3), kompetensi perangkat desa (X4), aksesibilitas laporan keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

**Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas**

Variabel / Indikator	r hitung	r tabel 5% (100)	Sig.	Keterangan
<b>Penyajian Laporan Keuangan (X1)</b>				
1	0.699	0.220	0,000	Valid
2	0.682	0.220	0,000	Valid
3	0.784	0.220	0,000	Valid
4	0.710	0.220	0,000	Valid
5	0.699	0.220	0,000	Valid
<b>Sistem Pengendalian Internal (X2)</b>				
1	0.632	0.220	0,000	Valid
2	0.718	0.220	0,000	Valid
3	0.660	0.220	0,000	Valid
4	0.782	0.220	0,000	Valid
5	0.619	0.220	0,000	Valid
6	0.731	0.220	0,000	Valid
7	0.642	0.220	0,000	Valid
8	0.627	0.220	0,000	Valid
9	0.532	0.220	0,000	Valid
<b>Partisipasi Masyarakat (X3)</b>				
1	0.673	0.220	0,000	Valid
2	0.671	0.220	0,000	Valid
3	0.779	0.220	0,000	Valid

4	0.815	0.220	0,000	Valid
5	0.730	0.220	0,000	Valid
6	0.716	0.220	0,000	Valid
<b>Kompetensi Perangkat Desa (X4)</b>				
1	0.644	0.220	0,000	Valid
2	0.655	0.220	0,000	Valid
3	0.647	0.220	0,000	Valid
4	0.593	0.220	0,000	Valid
5	0.550	0.220	0,000	Valid
6	0.648	0.220	0,000	Valid
<b>Aksesibilitas Laporan Keuangan (X5)</b>				
1	0.682	0.220	0,000	Valid
2	0.815	0.220	0,000	Valid
3	0.752	0.220	0,000	Valid
<b>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)</b>				
1	0.771	0.220	0,000	Valid
2	0.623	0.220	0,000	Valid
3	0.681	0.220	0,000	Valid
4	0.662	0.220	0,000	Valid
5	0.589	0.220	0,000	Valid
6	0.350	0.220	0,000	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah (2024)

Tabel 1 Indikator yang digunakan mengukur semua variabel didalam penelitian ini dinyatakan r hitung lebih besar dari r tabel. Apabila r hitung > r tabel pada signifikansi 5% maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Diperoleh bahwa dari indikator pada variabel yang digunakan penelitian tidak semuanya memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0.220 yaitu r tabel untuk sampel sebanyak 80 responden.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0.677	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0.617	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.629	Reliabel
Kompetensi Perangkat Desa (X4)	0.795	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X5)	0.767	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0.608	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah (2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai Alpha Cronbach variabel tersebut lebih besar dari 0.6. Kondisi ini juga menunjukkan yaitu seluruh variabel yang digunakan dapat digunakan pada analisis selanjutnya

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized
		Residual
N		80
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33536500
Most Extreme Differences	Absolute	.046
	Positive	.046
	Negative	-.038
Test Statistic		.046
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber : Hasil olah data menggunakan IBM SPSS 26 (2024)*

Berdasar tabel diatas hasil uji normalitas, mampu disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal. Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0.05.

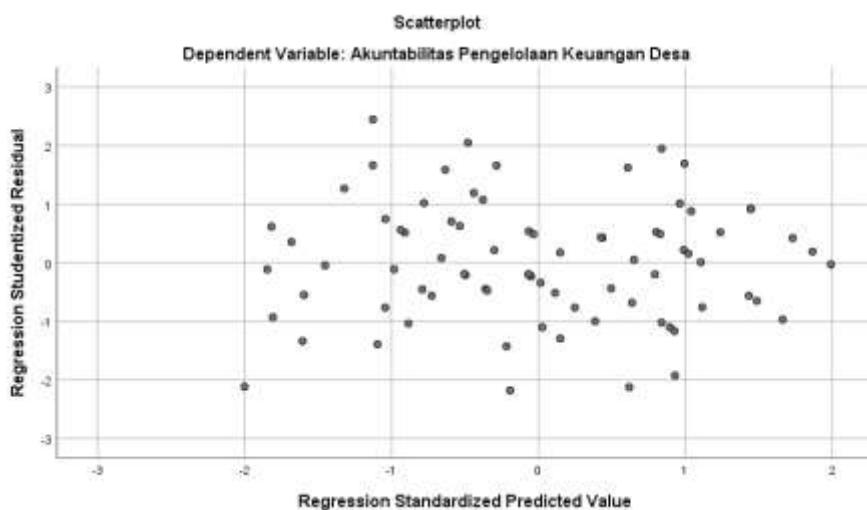
**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel Bebas	Perhitungan		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penyajian Laporan Keuangan	0.616	1.624	Tidak ada multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0.383	2.610	Tidak ada multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	0.367	2.728	Tidak ada multikolinearitas
Kompetensi Perangkat Desa	0.798	1253	Tidak ada multikolinearitas
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0.808	1.238	Tidak ada multikolinearitas

*Sumber : Data primer yang diolah (2024)*

Hasil tersebut menunjukkan semua variabel bebas mempunyai nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang berada dibawah angka 4 10.00 jadi dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung masalah multikolinieritas. Maka model regresi yang ada layak untuk dipakai dalam memprediksi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas**



*Sumber : Hasil olah data menggunakan IBM SPSS 26 (2024)*

Grafik ini terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak berbentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi jadi model regresi mampu dipakai untuk memprediksi Y.

**Tabel 6. Hasil Koefisien Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.817	2.524			.324	.747
Penyajian Laporan Keuangan	-.003	.091	-.002	-.030	.976	
Sistem Pengendalian Internal	.505	.056	.838	8.945	.000	
Partisipasi Masyarakat	.001	.081	.001	.011	.991	
Kompetensi Perangkat Desa	.290	.066	.286	4.409	.000	

Aksesibilitas Laporan Keuangan	-.156	.142	-.071	-1.103	.273
--------------------------------	-------	------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Hasil olah data menggunakan IBM SPSS 26 (2024)

Berdasarkan tabel diatas, maka peramaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah  $Y = 0.817 + (0.003) X1 + 0.505 X2 + 0.001 X3 + 0.290 X4 + (0.156) X5 + e$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Penyajian Laporan Keuangan dengan nilai t sebesar -0.030, nilai koefisien B sebesar -0.003, dan tingkat signifikan sebesar 0.976. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel Penyajian Laporan Keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dan tingkat signifikan sebesar 0.976. Artinya pengetahuan Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Sistem Pengendalian Internal dengan nilai t sebesar 8.945, nilai koefisien B sebesar 0.505, dan tingkat signifikan sebesar 0.000. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel Sistem Pengendalian Internal mampu memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Artinya Sistem Pengendalian Internal berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Partisipasi Masyarakat dengan nilai t sebesar 0.011, nilai koefisien B sebesar 0.001, dan tingkat signifikan sebesar 0.991. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel Partisipasi Masyarakat tidak memiliki pengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan tingkat signifikan sebesar 0.991. Artinya Partisipasi Masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Kompetensi Perangkat Desa dengan nilai t sebesar 4.409, nilai koefisien B sebesar 0.290, dan tingkat signifikan sebesar 0.000. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel Kompetensi Perangkat Desa mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Artinya Kompetensi Perangkat Desa mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan nilai t sebesar -1.103, nilai koefisien B sebesar -0.156, dan tingkat signifikan sebesar 0.273. Hal ini menandakan bahwa koefisien variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tingkat signifikan sebesar 0.273. Artinya Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 7. Uji t (Parsial)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients	Beta	t	Sig.	
B	Std. Error				
1 (Constant)	.817	2.524		.324	.747
Penyajian Laporan Keuangan	-.003	.091	-.002	-.030	.976
Sistem Pengendalian Internal	.505	.056	.838	8.945	.000
Partisipasi Masyarakat	.001	.081	.001	.011	.991

Kompetensi Perangkat Desa	.290	.066	.286	4.409	.000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	-.156	.142	-.071	-1.103	.273

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

*Sumber : Hasil olah data menggunakan IBM SPSS 26 (2024)*

Uji berguna untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat. Jika nilai  $sig < 0,05$ , atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai  $sig > 0,05$ , atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Uji t masing-masing terdapat pada tabel 7 yaitu pada nilai t dengan nilai  $df = n-k-1 = 80-5-1 = 74$  maka nilai t tabel diperoleh 1.668.

## 2. Pembahasan

### Hipotesis Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga menunjukkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap 1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga H1 ditolak. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian dari (Masyhur & Silfi, 2017) yang menyatakan Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Hal ini berarti pada penyajian laporan keuangan daerah belum disajikan secara memadai dan informasi dalam laporan keuangan belum disajikan secara baik. Kondisi ini ditunjukkan dari hasil penelitian masingmasing SKPD bahwa laporan keuangan yang dibuat belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan beberapa SKPD masih belum mengerti secara keseluruhan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

H1 : Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

### Hipotesis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengetahui bahwa Sistem Pengendalian Internal positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga H2 diterima. Hasil penelitian ini sama seperti penelitian (Puspa & Prasetyo, 2020) menyatakan sistem pengendalian internal dapat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil data ini

mengonfirmasi pelaksanaan sistem pengendalian internal selaras dengan peningkatan akuntabilitas. Makin baik penerapan SPI makin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berpengaruhnya sistem pengendalian internal pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dimungkinkan karena pelaksanaan SPIP di kelurahan yang berada di Kabupaten Demak telah optimal. Setiap aktivitas pengelolaan dana desa mulai dari monitoring dan evaluasi telah memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam SPIP. Identifikasi dan analisis risiko terhadap peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan telah dilakukan. Tidak hanya itu pula pengelolaan transaksi telah melalui otorisasi pihak yang berwenang sehingga informasi dalam laporan keuangan yang disajikan relevan dan berkualitas. Sistem pengendalian yang sesuai dan diwujudkan.

**H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa**

**Hipotesis Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil data penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jadi menunjukkan variabel Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga H3 ditolak. Hasil Penelitian mendukung penelitian dari (Reu & Lasdi, 2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Mampu disimpulkan yaitu partisipasi masyarakat desa belum sepenuhnya terwakili oleh semua masyarakat desa. Hal ini dikarenakan banyak aparatur desa yang masih memilih masyarakat tertentu saja untuk diikutsertakan dalam rapat yang diadakan oleh pemerintah desa. Adanya sistem tebang pilih ini kemudian menyebabkan aspirasi masyarakat yang terjadi di wilayah Kecamatan Mranggen belum seutuhnya terwakilkan dan didengarkan oleh aparatur desa pada umumnya. Sistem tebang pilih yang dimaksud adalah kebanyakan aparatur desa hanya mengikutsertakan masyarakat yang dianggap mendukung mereka secara langsung, sedangkan masyarakat desa yang berbeda pendapat jarang sekali diikutsertakan, karena dianggap akan menentang kebijakan yang dibuat mereka. Hal tersebut juga secara langsung menyebabkan tidak adanya pemerataan partisipasi desa secara utuh sehingga menyebabkan ketimpangan dalam musyawarah desa secara penuh.

**H3 : Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa**

**Hipotesis Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil data penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga H4 diterima. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian dari (Zulkifl et al., 2021) menunjukkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dari penelitian ini sejalan dengan teori stewardship yaitu dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan masyarakat memiliki tugas untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa dapat menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan tugas yang

seharusnya dilakukan oleh aparat. Ketika perangkat desa memiliki kompetensi yang baik, maka akan melakukan kinerja dalam pemerintahan dengan baik dan maksimal. Ketika kinerja baik dan dilakukan secara produktif, maka pemerintah desa melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga akan baik. Kinerja pemerintah desa harus ditunjang terlebih dahulu oleh kompetensi perangkat desa

H4 : Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa

### **Hipotesis Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan negatif dan tidak signifikan pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga menunjukkan bahwa 18 variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh pada Akuntabilitas 43 Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga H5 ditolak. Hasil Penelitian ini 75 mendukung penelitian dari (Khoirina, 2023) menyatakan bahwa aksesibilitas 18 laporan keuangan sendiri tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 1 dana desa. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin bagus aksesibilitas laporan keuangan desa, maka semakin bagus juga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dapat memberikan kemudahan bagi pengguna laporan 18 keuangan, kemudahan akses yang diberikan pengguna laporan keuangan akan 1 memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Akuntabilitas efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan 16 pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Menurut Mulyana (2006) akses yang diberikan dapat berupa media seperti 1 website (internet), surat kabar, radio, dan majalah forum untuk memberikan peranan yang mendorong pada akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

H5 : Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap 86 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang berjudul “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Kabupaten Demak” dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penyajian Laporan Keuangan negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Sistem Pengendalian Internal positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Partisipasi Masyarakat positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Kompetensi Perangkat Desa positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Aksesibilitas Laporan Keuangan negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Atikasari, D., & Jaeni, J. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Kendal. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1212–1222.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209.
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76.
- Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 1–13.
- Khoirina, A. (2023). INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mranggen ). *Ana Khoirina*, 02(02), 196–210.
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299–319.
- Meilani, N., & Sukarmanto, E. (2022). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 59–65.
- Periansya, & AR, S. (2020). *DAMPAK KOMPETENSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN*. 4(1).
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi*.
- Repitamala, Nurhayati, N., & Syarifudin, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 14–23.
- Reu, F. M., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di

Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59.

Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56.

Sya'diah, H., Sissah, & Hafiz, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 9(1), 62–70.

Temalagi, S., & Anakotta, F. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Accounting Research Unit: ARU Journal*, 2(1), 34–42.

Zulkifl, Z., Sandrayati, S., & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26–38.